

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan, laporan keuangan disusun oleh pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Informasi tentang laba mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan misalnya bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi.

Untuk mengetahui semua informasi tersebut investor / kreditor dapat melihat perbedaan pada Laba Fiskal (*Taxable Income*) dan Laba Akuntansi (*Book Income*) yang ada pada laporan keuangan pada perusahaan *Go Public*. Dengan informasi tersebut dapat dilihat kinerja perusahaan yang tercermin dari laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan memberikan prospek yang bagus pada perusahaan tersebut, untuk itu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan/laba dalam setiap tahunnya (Pindiharti, 2011).

Masalah muncul ketika perusahaan memiliki laba akuntansi (*Book Income*) yang besar dibandingkan laba fiskal (*Taxable Income*) pada laporan keuangan. Masalah dalam kondisi tersebut antara lain perusahaan terutama perusahaan yang telah *Go Public* pada manajemennya akan melakukan manajemen laba sebagai suatu kecurangan (*Fraud*) kaitannya dalam pembayaran pajak atau pelaporan pajak terutang pada perusahaan tersebut (Pindiharti, 2011)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang kita ketahui, peran pajak pada suatu Negara sangat penting didalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu Negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah didalam pajak ini sangat penting karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan Negara itu sendiri.

Pengertian pajak tersebut menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (pajak.go.id).

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp 872,6 triliun, sedangkan pada tahun 2012 target tersebut ditingkatkan menjadi Rp 1.032,57 triliun. Prosentase realisasi penerimaan terbesar pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). Penerimaan PPh mencapai 99,8% dari target yaitu sebesar Rp. 431,97 triliun. Salah satu harapan DJP dalam penerimaan pajak adalah perusahaan manufaktur. Didalam perusahaan manufaktur terdapat kurang lebih 3 sektor yang ada, indeks manufaktur yang sebagian besar komponen pembentuknya dari perusahaan yang bergerak di industri barang konsumsi 41,93% lebih tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibandingkan dari sektor aneka industri 32,22% kenaikan tersebut di dukung oleh beberapa perusahaan yang cukup dikenal ikut mendongkrak industri barang konsumsi ini secara signifikan antara lain, PT. Gudang Garam tbk (GGRM), PT. Unilever (UNVR), PT Indofood Sukses Makmur tbk (INDF) dan PT. Mayora Indah Tbk (MYOR). Selain itu peningkatan sektor indstri barang konsumsi secara tidak langsung menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat. (www.kemenperin.go.id) peningkatan pertumbuhan sektor industri barang konsumsi tidak diikuti secara seimbang oleh peningkatan penerimaan pajak yang seharusnya terjadi. Kesenjangan penerimaan tersebut disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyeteroran pajak atau masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat dan tren manajemen laba.

Manajemen laba adalah perilaku yang dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba dilakukan manajer dengan menggunakan penilaian tertentu dalam pelaporan keuangan dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi yang terjadi. Secara khas manajemen laba dilakukan dengan memindahkan penghasilan dari masa depan. Lebih lanjut, perusahaan dapat mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan beban-beban tertentu dengan tanpa melanggar aturan-aturan akuntansi yang berlaku.

Salah satu kasus manajemen laba pada tahun 2007 Bapepam memeriksa PT Agis.Tbk (TMBI) karena adanya manipulasi laporan keuangan PT Agis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Elektronik, yaitu pemberian informasi laba yang secara material tidak benar yang seharusnya total pendapatan yang disajikan PT Agis Elektronik sebesar Rp 466,8 miliar namun di sajikan sebesar Rp 800 miliar. Berdasarkan permasalahan di atas dilihat bahwa praktik manajemen laba seringkali dilakukan oleh para manajer untuk menghindari melaporkan kerugian dengan berbagai motivasi manajemen laba seperti misalnya membuat laporan keuangan terlihat lebih baik, dan dengan demikian memaksimalkan bonus yang diperoleh manajemen.

Kasus serupa tentang manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia adalah manajemen laba pada PT Kimia Farma Tbk. Pihak manajemen PT Kimia Farma Tbk melakukan penggelembungan (mark up) laba pada tahun 2011 sebesar Rp. 32,6 milyar. Berdasarkan penyelidikan Bapepam disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut (Kompasiana.com)

Dan lagi kasus manajemen laba yang terjadi adalah kasus pada PT. Ades Alfindo. Kasus pada PT. Ades Alfindo terungkap pada 2004 ketika manajemen baru PT. Ades menemukan ketidak inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Pada juni 2004 terjadi perubahan manajemen di PT. Ades dengan masuknya *water partners bottling co.* (perusahaan patungan *the coca-cola company* dan *nestle sa*) dengan kepemilikan saham sebesar 65,07%. Pemilik baru inilah yang berhasil menemukan adanya inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama. Inkonsistensi pencatatan terjadi antara 2001 dan kuartal kedua 2004. Hasil penelusuran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menunjukkan untuk setiap kuartal angka penjualan lebih tinggi antara 0,6-3,9 juta galon dibandingkan angka produksi. Hal ini tentu tidak logis karena tidak mungkin orang menjual lebih banyak dari pada yang diproduksi. Manajemen ades baru melaporkan angka penjualan riil pada 2001 diperkirakan lebih rendah dari Rp13 Miliar dari yang dilaporkan. Pada 2002, perbedaanya mencapai Rp45 Miliar, sedangkan untuk 2003 sebesar Rp55 Miliar. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh luputnya pengamatan publik karena PT. Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan PT. Ades pada 2001 dan 2004 lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan.

Menurut Scoot 2002 menyatakan bahwa didalam teori akuntansi positif salah satunya *Political Cost Hypothesis*. *Political Cost Hypothesis* menjelaskan semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba dan perusahaan yang berhadapan dengan biaya cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya beban pajak.

Dengan adanya pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin. Maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen, pajak pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2001:10).

Menurut Zain (2003:67) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyeludupan pajak. Untuk mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak, perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung karena adanya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba dan ini dapat mempengaruhi posisi laporan keuangan dan tidak seimbangannya saldo akhir sehingga perlu dilakukan penyesuaian saldo antara saldo laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Menurut Yulianti (2009), perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan.

Beban pajak tangguhan adalah Pajak tangguhan (*deffered tax*) adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang (Tundjung 2015). Beban pajak tangguhan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Taufik Budiman 2013).

Selain itu Scoot 2000 dalam RR.Sri Handayani dan Gustono (2009) menyarankan untuk menggunakan proksi ukuran perusahaan dalam kerangka *political cost*. Berdasarkan ukuran perusahaan yang dipaparkan oleh Scoot 2000 berasumsi bahwa perusahaan besar secara politis lebih besar melakukan transfer *political cost* (biaya politik), dibandingkan dengan perusahaan kecil. Lebih lanjut beberapa peneliti berhasil membuktikan bahwa *political proses* memiliki dampak pada pemilihan prosedur akuntansi oleh perusahaan yang berukuran besar.

Veronica dan Bachtiar dalam Ni Ketut Muliati (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan secara positif dengan manajemen laba. Perusahaan besar mempunyai insentif yang cukup besar untuk melakukan manajemen laba, karena salah satu alasan utamanya adalah perusahaan besar harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan dalam upaya pengklasifikasian besar kecilnya suatu perusahaan. Dimana dalam menghitung ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan baik itu aset tetap, aset lancar atau pun aset tidak berwujud. (Khairatul Insani 2015)

Penelitian yang dilakukan Herdawati (2015) dengan judul pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dengan hasil beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya penelitian Taufik budiman (2013) dengan

Dan juga penelitian dilakukan Khairatul Insani dengan judul pengaruh earnings power dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015).

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Herdawati (2015) mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan dari penelitian Gunawan, Darmawan dan Purnawati (2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
- b. Bagaimanakah pola manajemen laba yang terdapat pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Untuk mengetahui pengaruh pola manajemen laba yang terdaftar pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi :

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan saham.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Praktisi/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba.
3. Para investor, penelitian ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap saham yang diperjualbelikan di bursa melalui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi yang dinilai paling tepat.
4. Masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada informasi laporan keuangan.
5. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau referensi perluasan penelitian selanjutnya bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang disiapkan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penting yang akan berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.